

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Otonomi daerah biasanya diterapkan di negara-negara yang demokratis dan berbentuk serikat dan kesatuan. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan otonomi daerah dalam realisasinya masih banyak persoalan dan kendala implementasi, yang disebabkan oleh Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas, aturan pelaksanaannya yang selalu berubah serta kepentingan politik lebih dominan dari pada kepentingan ekonomi atau lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berskala atas capaian daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai evaluasi bagaimana program

tersebut berjalan, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan, dan sebagai alat komunikasi dengan publik. Dengan demikian penting untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga dapat mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Karakteristik pemerintah daerah adalah suatu ciri-ciri khusus pemerintah daerah. Maka dari itu karakteristik inilah yang akan menjadi pembeda satu daerah dengan daerah yang lainnya, dimana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, perbedaan karakteristik antara daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, kesejahteraan, *functional differentiation*, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, *leverage* daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, belanja modal, status daerah, dan lain sebagainya.

Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. Ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Mardiasmo, 2006).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Adanya tuntutan

pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas.

Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Riau menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran pemerintah daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. Di sisi lain, realisasi penerimaan Provinsi Riau tahun 2017 berjumlah 9.247,19 milyar rupiah. Dibanding dengan realisasi penerimaan Provinsi Riau 2018 yang berjumlah 8.528,82 milyar rupiah menurun sebesar 7,77 persen. Realisasi pengeluaran Provinsi Riau 2018 berjumlah 8.528,82 milyar rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 5.606,43 miliar rupiah, dan belanja langsung sebesar 2.863,14 miliar rupiah.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pusat, sehingga penyelenggaraan otonomi dan keleluasaan daerah tercapai secara maksimal. Adapun strategi yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta optimalisasi BUMD.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ” (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran (*size*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019?
2. Apakah kemakmuran (*wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019?

3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019?
4. Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019?

### 1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah hanya fokus pada pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2015-2019.

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ukuran (*size*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui apakah kemakmuran (*wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui apakah belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

### **1. Bagi Peneliti**

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan masalah yang diteliti, yaitu pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada provinsi Riau.

### **2. Bagi Akademisi**

penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian dimasa yang akan datang.

### **3. Bagi provinsi Riau**

penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam menjalankan kinerja keuangan di provinsi Riau.

### **4. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang berasal dari Program Studi lain.

## **1.6 Sistem Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

### **BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang penjelasannya tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

